

ANALISIS PERMASALAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LAMASI

HISMA KAHMAN
RITA MUSTIKASARI



telapak

ANALISIS PERMASALAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LAMASI

By:

**Hisma Kahman
Rita Mustikasari**

English editor:

Sunama Nawawi

Bahasa Indonesia editor:

'Nonet' Sadiyah Istichomah

Photos and graphics:

Air Telapak

Dicetak di Bogor, Indonesia, oleh Telapak Printing

ANALISIS PERMASALAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LAMASI

Serial publikasi ini merupakan keluaran dari proyek Program peningkatan kapasitas diri bagi Telapak dan mitranya dalam mengimplementasikan Pendekatan Negosiasi menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (CDP IWRM NA).

MoU: 313-2009-527-CN antara Telapak dan Both ENDS, Belanda.

Both ENDS menerima dana dari PSO – asosiasi organisasi pembangunan Belanda untuk menguatkan Kelompok Masyarakat Sipil dalam mengimplementasikan Pendekatan Negosiasi (NA). Ini merupakan sebuah usaha dalam proses pembuatan kebijakan yang bertujuan menguatkan aktor lokal yang mampu terlibat penuh dalam semua tingkatan pembuatan kebijakan.

Email: info@bothends.org
Website: www.bothends.org

Telapak
Email: info@telapak.org
Website: www.telapak.org
www.air.telapak.org

April 2011

Kata Pengantar

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa komunitas masyarakat dan penduduk pedesaan di seluruh dunia mampu mengelola atau terlibat menjadi pengelola-bersama (*co-manage*) sungai, danau dan 'air tanah' (*groundwater*) yang ada di kawasannya. Secara berangsur terjadi peningkatan perhatian pemerintah, dimana mereka mulai mengenali adanya kebutuhan mendudukkan masyarakat menjadi pengelolaan air yang sesungguhnya terjadi setiap harinya dalam kehidupan keseharian mereka, yang juga melibatkan masyarakat dalam penetapan kebijakan terkait pengelola air.

Both ENDS dan Telapak bekerja bersama-sama mempromosikan kisah sukses model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Kerjasama ini berdasarkan pada keyakinan bahwa kesuksesan dan efektifitas pengelolaan sumber daya hanya bisa terjadi jika masyarakat memiliki kapasitas dan kesempatan untuk mengembangkan diri dan menegosiasikan visi dan solusi atas persoalan pengelolaan sumber daya yang mereka hadapi.

Masyarakat punya keinginan untuk mengelola sendiri dan memahami sumber dayanya agar bisa menggunakan ekosistem alam seperti sungai dan danau yang ada di kawasan tempat mereka tinggal. Mengingat hal ini, Both ENDS menyambut baik terbitnya Buku Panduan Studi Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas (AL&AA) dan serialnya¹. Buku-buku ini akan membantu masyarakat luas dan kelompok masyarakat pengguna air lainnya untuk memahami aktivitas ekonomi dan berbagai hal terkait aktor multi-pihak yang terlibat di suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Lebih jauh Analisa Permasalahan Bersama yang dihasilkan

I Serial publikasi CDP IWRM NA terdiri dari:

1. Persepsi Pengguna Air, Sebuah Panduan Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas Ekonomi dalam Pendekatan Negosiasi menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.
2. Hasil Uji Coba Penerapan Panduan Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas Ekonomi di DAS Lamasi.
3. Analisis Permasalahan DAS Lamasi
4. Gambaran Umum Permasalahan Pengelolaan Air di DAS Air Bengkulu



dari pelaksanaan Studi AL&AA ini bisa menjadi pegangan bersama bagaimana menempatkan persoalan yang dihadapi masyarakat lokal ke dalam konteks politik dan ekonomi yang lebih luas (*geopolitical and geo-economic context*). Serial publikasi ini akan meningkatkan kapasitas masyarakat pengguna air untuk memimpin secara efektif bagaimana seharusnya pengelolaan air yang terjadi di DAS tempat mereka tinggal.

Both ENDS dan Telapak terus berharap agar sungai tetap mengalir bebas untuk keuntungan masyarakat luas dan pengguna air lainnya yang tergantung atas keberadaannya. Saya percaya bahwa kerja-kerja Telapak selama ini berguna untuk organisasi masyarakat sipil dan berkontribusi atas terwujudnya aspirasi masyarakat pengguna air di Indonesia atas sungai yang terus bebas mengalir.

Danielle Hirsch
Direktur Both ENDS



Kata Pengantar

Masyarakat sebagai pemegang hak (*right holder*), seperti yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, akan dijamin oleh negara untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok di dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat terselenggara dengan baik, maka Undang-Undang no 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan organisasinya dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Di tataran praktek pada kehidupan sehari-hari, banyak kita temukan masyarakat yang secara aktif dan arif menjaga dan memanfaatkan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan atas air. Dengan fakta seperti ini, sudah seharusnya pemerintah memberikan pengakuan atas upaya mereka dalam mengelola sumber daya air dan menyediakan ruang seluas-luasnya agar terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolan sumber daya air karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka.

Agar keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya air bisa berjalan efektif, maka hal penting yang dibutuhkan adalah mempersiapkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam memberikan argumen dan masukan yang konstruktif, dalam proses-proses bernegosiasi dengan para pengambil kebijakan. Sejalan dengan itu, kami menyambut baik terbitnya serial buku Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas Ekonomi (AL&AA)¹.

1 Serial publikasi CDP IWRM NA terdiri dari:

1. Persepsi Pengguna Air, Sebuah Panduan Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas Ekonomi dalam Pendekatan Negosiasi menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.
2. Hasil Uji Coba Penerapan Panduan Analisa Nafkah Hidup dan Analisa Aktivitas Ekonomi di DAS Lamasi.
3. Analisis Permasalahan DAS Lamasi
4. Gambaran Umum Permasalahan Pengelolaan Air di DAS Air Bengkulu



Telapak dan Both END berharap pemerintah akan memastikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dan berperan serta di dalam proses-proses penentuan kebijakan dan intervensi pengelolaan sumber daya air. Semoga rangkaian serial publikasi ini dapat memberikan manfaat sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi kelompok masyarakat sipil untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang lebih baik dan adil. Karena air adalah hak asasi setiap warga negara di Indonesia.

Christian Purba
Badan Pengurus Telapak
Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional



Ucapan Terimakasih

Program peningkatan kapasitas diri bagi Telapak dan mitranya ini (CDP IWRM NA) merupakan sebuah training dan kesempatan yang baik untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman di bidang air dan pengembangan network dan kredibilitas Telapak, Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS) dan Yayasan Ulayat Bengkulu (YUB). Penulis berharap semakin banyak Anggota Telapak dan mitranya, dan masyarakat luas yang tertarik dan terlibat penuh dalam pengelolaan air, dan lebih jauh lagi mengambil peran aktif dalam setiap tahapan manajemen (pembuatan perencanaan, implementasi dan monitoring-evaluasi) dan mampu menegosiasikan kepentingannya hingga mempengaruhi pembuatan kebijakan.

Terimakasih kepada Rob Koudstaal yang menjadi penasihat Proyek CDP, yang dengan sepenuh hati mendampingi Tim CDP selama 2,5 tahun terakhir sejak kehadiran pertamanya di Kedai Telapak pada Desember 2007. Will Burghorn telah membantu menajamkan pengetahuan antropologi dan sensitivitas atas isu sosial yang menjadi roh utama serial buku output Proyek CDP ini. Christa Nooy telah mendukung keberlanjutan kegiatan ini, terus memberi semangat, menunjukkan peluang pengembangan konsep Pendekatan Negosiasi (NA), dan lebih jauh menghubungkannya dengan forum internasional.

Terimakasih kepada teman-teman di Telapak, PBS dan YUB. Mari kita bersama-sama menggunakan serial publikasi ini untuk mengembangkan dengan lebih baik pengetahuan

tentang Daerah Aliran Sungai di wilayah kita masing-masing dan mendukung para pengguna air dalam menegosiasikan kepentingan mereka untuk pendekatan yang seimbang antara pengurangan kemiskinan, penggunaan air secara berkelanjutan dan pembangunan ekonomi.

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Terima Kasih	v
I. Pendahuluan	I
II. Karakteristik umum DAS Lamasi	3
II.1. Ringkasan	3
II.2. Pengaturan Kelembagaan untuk Pengelolaan Air di DAS Lamasi	4
II.2.1. Institusi	5
II.2.2. Peraturan Daerah (Perda) DAS dan Komite DAS Lamasi	9
II.3. Kondisi Sumberdaya Alam	9
III. Ketersediaan Air	13
Kondisi Sungai	13
IV. Produksi Dan Aktivitas Penggunaan Air	15
IV.1. Agroforestri	15
IV.2. Pertanian Padi di Lahan Basah	16
IV.2.1. Sistem Irigasi yang Dibangun Pemerintah	18
IV.2.2. Irigasi di Hilir Lamasi	19
IV.3. Penangkapan Udang dan Ikan, serta Budidaya Ikan	19
IV.4. Budidaya Rumput Laut	20
IV.5. Pertambangan Tanah	21
IV.6. Penambangan pasir dan kerikil di Sungai (Pertambangan Galian C)	21
V. Masyarakat dan Kehidupannya	25

VI. Proyek Saat Ini dan Yang Direncanakan.....	29
VII. Identifikasi Permasalahan	31
VII.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Pengamatan Tim PBS	31
VII.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan FGD PBS Tahun 2008	33
VIII. Saran Untuk Aksi	35
Daftar Pustaka	37
Lampiran	39
Lampiran 1. Peta DAS Lamasi.....	40
Lampiran 2. Peta DAS Lamasi dan Rongkong.....	41
Lampiran 3. Daftar Desa-Desa di Das Lamasi	42

Daftar singkatan

- AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
- AMPERA: Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat
- APBD: Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
- APBN: Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional; National Budget for Development
- BAPPEDA: Badan Perencana Pembangunan Daerah; Regional Planning and Development Agency
- BPDAS: Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai; River Basin Management Board
- CDP IWRM NA: Telapak's Capacity Development Project with a mission to apply the Negotiated Approach to IWRM; Proyek Peningkatan Kapasitas Diri Telapak dan Mitraanya dalam Mengimplementasikan Pendekatan Negosiasi menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
- DAS: Daerah Aliran Sungai
- Gol: Pemerintah Republik Indonesia
- GP3A: Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
- IWRM: Integrated Water Resources Management; Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
- ITB: Institut Teknologi Bandung
- IUP: Izin Usaha Pertambangan
- KDL: Komite DAS Lamasi
- NA: Negotiated Approach; Pendekatan Negosiasi

PSDA: Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
TKPSDA: Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
TGHK: Tata Guna Hutan Kesepakatan
TPLD: Tata Pemerintahan Lokal Demokratis
UPTD: Unit Pelaksana Teknis Daerah
Forum DAS Walmas: Forum Daerah Aliran Sungai Walendrang-Lamasi
O&M: Operation and Maintenance; Operasi dan Pemeliharaan
Perda: Peraturan Daerah
P3A: Perkumpulan Petani Pemakai Air
WS: Wilayah Sungai
YBS: Yayasan Bumi Sawerigading





Pendahuluan

Analisis Permasalahan DAS Lamasi ini ditulis sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas kelembagaan Telapak dam mitranya yang dilaksanakan oleh Telapak dalam Proyek CDP IWRM NA (Program Pengembangan Kapasitas Telapak dan mitranya dengan misi mengaplikasikan Pendekatan Negosiasi menuju Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu).

Dokumen ini disiapkan untuk mendukung kerja dan fungsi Komite DAS Lamasi (KDL). Cakupan dokumen ini terbatas pada fakta yang dianalisis dalam konteks Proyek CDP dan belum mempertimbangkan berbagai analisis mendalam permasalahan yang terjadi di DAS Lamasi. Diharapkan dokumen Analisa Permasalahan Bersama ini akan membantu KDL dalam melaksanakan tugasnya.

Analisis masalah ini dipersiapkan oleh Hisma Kahman dan timnya (Afrianto dan Rahmat yang bertanggung-jawab atas pengumpulan data lapang) dari Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS)¹ dengan pendampingan dari Tim CDP (Rita Mustikasari, Oka Andriansyah dan Denny Boy Mochran) melakukan implementasi program CDP IWRM NA dari September 2008 sampai April 2011.

Analisis masalah ini dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Analisa Nafkah Hidup² dan aktivitas ekonomi di DAS Lamasi (Kahman H., R. Mustikasari., 2011)) yang dilakukan dengan menggunakan Panduan untuk Analisa Nafkah Hidup dan Aktivitas Ekonomi dalam Konteks Pendekatan Negosiasi Untuk Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Mustikasari R., 2011). Laporan lain yang menggunakan panduan ini dan juga

1 Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS) berubah dari bentuk Yayasan Bumi Sawerigading pada tahun 2008.
2 Analisa Nafkah Hidup adalah terjemahan dari Livelihood Analysis, yang kemudian dalam tulisan ini disingkat menjadi AL.



dipublikasikan di bawah Proyek CDP adalah Gambaran Umum DAS Air Bengkulu (Andriansyah O., R. Mustikasari, 2011a) yang disusun berdasarkan Potret Masyarakat dan Aktivasnya di DAS Air Bengkulu (Andriansyah O., R. Mustikasari, 2011b). Dokumen-dokumen ini pada prinsipnya merupakan analisis yang dibuat oleh masyarakat lokal karena dokumen ini dibuat berdasarkan persepsi masyarakat pengguna air yang tinggal di DAS Lamasi dan DAS Air Bengkulu.

Dokumen ini dibagi menjadi delapan bab; Bab I adalah pendahuluan, menjelaskan tujuan dari dokumen, penulis dan proses pembuatan. Bab II menyajikan karakteristik umum DAS Lamasi, kelembagaan sumberdaya air, peraturan terkait DAS Lamasi, dan Komite DAS Lamasi. Bab III membahas ketersediaan air. Penulis menyajikan sedikit informasi dalam bab ini karena kurangnya data yang bisa dikumpulkan. Fokus bab ini adalah kondisi terkini Sungai Lamasi. Bab IV memuat tentang aktivitas produksi. Bab ini fokus pada tiga aktivitas produksi, yaitu pertanian padi (sawah irigasi dan non-irigasi), nelayan, dan pertanian rumput laut. Bab V memaparkan siapa masyarakat dan bagaimana kondisinya. Bab VI menyajikan program-program saat ini dan mendatang. Bab VII menyajikan permasalahan yang dihadapi, dan Bab VIII memuat saran untuk KDL.





Karakteristik umum DAS Lamasi

II.1. Ringkasan

Luas total area DAS Lamasi adalah 48.732 ha (487,32 km²). Sungai utama pada DAS ini adalah Sungai Lamasi dengan panjang 69 km. DAS Lamasi berada di tiga wilayah administrasi: Kabupaten Toraja Utara (4.196 ha atau 9%) ; Kabupaten Luwu Utara (7.227 ha atau 15%); dan Kabupaten Luwu (37.310 ha atau 76%). Peta DAS Lamasi disajikan di Lampiran I; DAS ini berbatasan dengan:

- ◆ DAS Rongkong di sebelah timur laut
- ◆ DAS Paremang di sebelah barat daya
- ◆ Teluk Bone di sebelah tenggara
- ◆ Batas hidrologi dengan sungai yang mengalir ke barat di barat laut

Untuk tujuan manajemen air, Kementerian Pekerjaan Umum membagi seluruh area Indonesia menjadi beberapa Wilayah Sungai (WS)³. Wilayah Sungai Pompengan-Janeberang dimanan DAS Lamasi termasuk dalam pengelompokkannya, menjadi perhatian pemerintah pusat, dan oleh karenanya ditetapkan sebagai WS Strategis Nasional.

3 Terminologi Wilayah Sungai (WS) digunakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menunjukkan unit pengelolaan atas lebih dari satu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kementerian Kehutanan menggunakan terminologi DAS dalam istilah untuk pengelolaan kawasannya.



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membagi seluruh DAS yg ada di wilayahnya ke dalam empat unit manajemen yg disebut Wilayah Sungai (WS)⁴ yang terdiri dari beberapa DAS. Keempat WS tersebut adalah WS Jeneberang; WS Walane Cendrane; WS Pompengan Larona; dan WS Saddang. DAS Lamasi adalah bagian dari WS Pompengan Larona. WS ini mencakup 11 DAS yaitu: 1) Pompengan; 2) Larona; 3) Latuppa; 4) Bua; 5) Makawa; 6) Kalaena; 7) Bungadidi; 8) Kebo; 9) Balease; 10) Rongkong; dan 11) Lamasi (BAPPEDA Sulawesi Selatan, 2009).

Meskipun DAS Lamasi dikelompokkan dalam satu wilayah sungai bersama 10 DAS lainnya, DAS Lamasi memiliki keterkaitan erat secara hidrologi dengan DAS Rongkong. Keterkaitannya adalah karena areal luapan banjir di wilayah hilir Sungai Lamasi dan Sungai Rongkong bertemu dan membentuk dataran banjir di daerah hilir. Daerah banjir yang termasuk dalam DAS Lamasi berada di Kecamatan Lamasi Timur dan Malangke di Kabupaten Luwu.

Belum ada data yang tersedia untuk membuat perkiraan yang dapat dipercaya tentang jumlah total populasi di DAS Lamasi. Dari fakta yang disajikan dalam tabel di Appendix 3, Daftar Penduduk di DAS Lamasi, diasumsikan bahwa pada tahun 2009, sekitar 55.000 orang tinggal di 28 desa di DAS Lamasi yang berada di Kabupaten Luwu (mencakup sekitar $\frac{3}{4}$ total luas DAS). Walau fakta bahwa 4 desa di bagian hulu DAS Lamasi yang masuk di Kabupaten Toraja Utara dan Luwu Utara adalah desa yang tingkat populasinya masih tergolong jarang, tetapi dapat diperkirakan bahwa pada tahun 2009, jumlah penduduk yang tinggal di DAS Lamasi mencapai total 60.000 orang. Berdasarkan informasi dari pengamatan lapangan, terdapat kesan bahwa angka populasi penduduk tumbuh cepat di seluruh bagian DAS.

II.2. Pengaturan Kelembagaan untuk Pengelolaan Air di DAS Lamasi

DAS Lamasi melewati batas kabupaten, sehingga berdasarkan Undang-Undang No.7 (Gol, 2004) tentang pengelolaan sumberdaya air, otoritas pengelolaan berada di tingkat provinsi atau tingkat nasional. DAS Lamasi adalah bagian dari WS Pompengan Larona di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Untuk alasan praktis, Dewan

4 Di dalam laporan ini digunakan istilah WS (Wilayah Sungai) yang merupakan terminologi yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang berbeda dengan konsep DAS yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan

Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan pengelolaan di bawah otoritas WS Pompeangan Larona seharusnya menjadi otoritas pemerintah pusat. (Sumber: diskusi personal antara tim CDP dan kepala PSDA provinsi pada 12 Juli 2010).

Saluran irigasi di DAS Lamasi terbagi menjadi dua berdasarkan saluran infrastruktur Bendung Lamasi yang dibangun yaitu saluran irigasi Lamasi Kanan (5.503 ha) dan Lamasi Kiri (4.803 ha). Menurut Kepala Dinas PSDA Luwu, Saluran Irigasi Lamasi Kiri sudah beroperasi dengan baik. Sedangkan Saluran Irigasi Lamasi Kanan masih dalam pembangunan. Selama penyelesaian proyek ini masih belum pasti dan sistem belum berfungsi dengan baik, air irigasi hanya mengalir seadanya saat memungkinkan. Saluran Irigasi Lamasi Kanan berada di Kecamatan Walenrang Utara, Lamasi dan Lamasi Timur. Daerah irigasi keseluruhan dari Bendung Lamasi terletak di bawah kewenangan Dinas PSDA Kabupaten Luwu (Sumber: informasi dari Kepala Dinas PSDA Luwu).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang irigasi (Gol, 2006), operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dengan luas lebih dari 5.000 ha berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Namun peraturan ini belum diimplementasikan di Kabupaten Luwu (akhir 2010).

II.2.1. Institusi

Berikut ini adalah institusi utama pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air di DAS Lamasi

1. Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Badan ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kehutanan yang berada di daerah dan bertanggungjawab untuk pengawetan dan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air. Terdapat dua BPDAS di Sulawesi Selatan yaitu BPDAS Saddang dan BPDAS Jeneberang Walanae. BPDAS Saddang berkantor di Kabupaten Toraja dan menangani 71 DAS di Sulawesi Selatan⁵.
2. Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan No. 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Pola Kerja Kantor Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Provinsi Sulawesi Selatan, 2008). PSDA bertanggung jawab untuk pengelolaan sumberdaya air dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan pendampingan.

5 Konsep DAS dan WS adalah berbeda. Kementerian Kehutanan menggunakan terminologi DAS yang memiliki batas hidrologi, sedangkan Kementerian PU menggunakan WS untuk unit pengelolaan yang terdiri dari beberapa DAS.

Untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam Pasal 137 Perda Provinsi No 08/2008, PSDA bertanggungjawab untuk:

- a. Membuat kebijakan terkait aspek teknis sumberdaya air, termasuk pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan sungai, danau, bendungan dan pantai, irigasi dan rawa sesuai standar kualitas air.
 - b. Memfasilitasi masalah-masalah terkait sumber daya air dan menyediakan layanan publik terkait pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan sungai, danau, bendungan dan pantai, irigasi dan rawa sesuai standar kualitas air.
 - c. Menyediakan pendampingan terkait pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan sungai, danau, bendungan dan pantai, irigasi dan rawa sesuai standar kualitas air.
3. Dinas PSDA Kabupaten Luwu. Institusi ini diberikan mandat oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya air. Untuk melaksanakan tugas dari desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Tugas PSDA meliputi:
- a. Merencanakan kebijakan teknis tentang pengelolaan sumberdaya air kabupaten;
 - b. Mengeluarkan lisensi dan implementasi layanan publik;
 - c. Melaksanakan tugas administrasi
 - d. Mendampingi UPT pengelolaan sumberdaya air seperti UPTD irigasi; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

PSDA Luwu secara struktur tidak berada di bawah Dinas PSDA Provinsi. Dua organisasi ini berhubungan satu sama lain dalam skema koordinasi.

4. Dinas PSDA Kabupaten Sulawesi Utara dan Dinas PSDA Toraja Utara dengan tugas yang sama dengan yang disebutkan di poin 3.
5. Dewan Sumberdaya Air Provinsi. Pembentukan dewan ini ditetapkan dengan UU No.7/2004. Dewan ini dibentuk oleh setiap provinsi untuk mengintegrasikan berbagai sektor, kabupaten, dan pemangku kepentingan sumberdaya air di tingkat provinsi. Dewan ini membantu gubernur memformulasikan kebijakan dan strategi pengelolaan sumberdaya air di provinsi.
6. TKPSDA WS Pompengan-Jeneberang. Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PU tanggal 22 Januari 2010. Sungai Lamasi adalah salah satu DAS di bawah TKPSDA WS Pompengan-Jeneberang. Pada tahun 2010, terdapat usulan untuk membagi TKPSDA tersebut menjadi empat sesuai dengan WS yang berbeda.

TKPSDA adalah organisasi non-struktural di bawah Kementerian PU dan berdomisili di provinsi dimana kantor BBWS/BWS berada. TKPSDA bertanggung jawab untuk memikirkan pola dan merencanakan sumberdaya air di dalam WS dalam hal ini WS Pompengan-Jeneberang. TKPSDA juga bertanggung jawab untuk merencanakan alokasi air di tiap sumber air dan perencanaan pengelolaan sistem hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi di WS Pompengan-Jeneberang untuk mengintegrasikan sistem informasi. Seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan, TKPSDA WS Pompengan-Jeneberang akan didampingi oleh sekretariat yang struktur dan pola kerjanya ditentukan oleh pengurus TKPSDA WS Pompengan-Jeneberang.

Selain itu, berikut ini adalah organisasi masyarakat yang terkait.

1. Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS). PBS merupakan salah satu LSM lokal yang bekerja di DAS Lamasi. PBS telah bekerja di DAS Lamasi sejak 1999. Aktivitas awal organisasi ini adalah pemetaan partisipatif di Desa Sangtandung, di daerah hulu DAS Lamasi, dan teritori masyarakat adat Lempe. Tahun 2004 PBS –melalui Program Tata Pemerintahan Lokal Demokratis atau TPLD– melakukan inventarisasi isu yang dihadapi tiap-tiap daerah di Luwu Raya⁶. PBS juga mengorganisir masyarakat di Luwu Raya dengan memfasilitasi forum masyarakat di tiap desa di DAS Lamasi dan memperkuat masyarakat DAS Lamasi melalui pelatihan (training).

Semakin menurunnya kelembagaan adat yang sedianya merupakan arena tempat pengambilan keputusan tertinggi. Sehingga pada tahun 2004, YBS, HUMA dan seorang Anggota Telapak di Palopo mendorong lahirnya sebuah peraturan daerah terkait masyarakat adat. Yaitu Keputusan Bupati Luwu Utara No 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko (Kabupaten Luwu Utara, 2004).

2. Forum DASWalmas. Forum ini dibentuk dengan mandat dari forum masyarakat. Pada tahun 2005, wakil dari forum masyarakat (dari daerah hulu dan hilir) mengadakan diskusi dan memutuskan untuk membentuk forum yang lebih besar. Fungsi forum ini adalah sebagai tempat pengaduan untuk masyarakat dan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, forum DAS yang mewakili masyarakat DAS Lamasi, memberikan jalan untuk pengeluaran peraturan daerah tentang pengelolaan dan konservasi DAS Lamasi (difasilitasi oleh PBS). Pada tahun 2006, peraturan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu. Dalam tahap awal, forum

6 Pada awal 2000, Luwu Raya terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota; Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kota Palopo.



berjalan dengan baik. Tidak hanya sebagai mediator untuk pengelolaan isu DAS, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi perantara konflik sosial. Saat ini, Forum DAS Lamasi tidak seaktif seperti pada awalnya, karena beberapa anggotanya memasuki arena politik, dan oleh karena itu mereka lebih sibuk dengan hal-hal politik dan kadang-kadang pula oleh urusan pribadi.

3. P3A. Di DAS Lamasi, terdapat beberapa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan beberapa anggota Forum DAS termasuk menjadi anggotanya. Saat ini, P3A masih belum bisa bekerja berdasarkan mandat dan fungsinya. Selain itu, masyarakat belum mendapat keuntungan dari organisasi ini. Fungsi dari P3A adalah untuk memenuhi kebutuhan petani di daerah masing-masing, seperti kebutuhan akan air dan fasilitas produksi. P3A bertanggung jawab untuk:
 - ◆ Menyamakan distribusi air irigasi untuk para anggotanya;
 - ◆ Mengorganisir kerja bersama masyarakat untuk membersihkan saluran irigasi;
 - ◆ Mengoordinasikan pengelolaan dengan pemerintah lokal;
 - ◆ Membuat laporan penanaman di daerahnya; dan
 - ◆ Mengumpulkan iuran dari anggota, yang berkisar sekitar Rp. 40.000 sampai Rp.50.000/ha.
4. GP3A. GP3A mengkoordinasikan beberapa P3A di area kerja mereka masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan koordinator P3A di Area I (DAS Lamasi) Dinas PSDA Luwu, terdapat empat GP3A di saluran irigasi Lamasi Kiri, mengorganisir 53 P3A. Menurutnya, Saluran Irigasi Lamasi Kanan, tidak memiliki P3A karena saluran irigasi masih dalam rehabilitasi. Tugas utama GP3A termasuk koordinasi dengan Dinas PSDA dan mengumpulkan iuran dari P3A.
5. AMAN Tana Luwu. Organisasi masyarakat adat ini berdiri tahun 2009, bertujuan untuk mendorong masyarakat adat di Tana Luwu untuk Berdaulat secara politik, Bermartabat secara budaya dan Mandiri secara ekonomi. Komunitas adat anggota AMAN di Walmas adalah: Kujan, Kadinginan, Bure, Sampeong, Buntu Tallang, Lewandi, Bosso', Makawa, Pongko', Tombang dan Sangtandung.

II.2.2. Peraturan Daerah (Perda) DAS dan Komite DAS Lamasi

Inisiatif lokal untuk IWRM di DAS Lamasi dimulai tahun 2004 –terutama di Kabupaten Luwu– dengan pembentukan Forum DASWalmas (lihat bab II.2.1). Forum ini mendorong dan menginisiasi lahir dan disetujuinya Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pelestarian DAS Lamasi di Kabupaten Luwu (Kabupaten Luwu, 2006).

Dengan dikeluarkannya peraturan itu, Telapak dan PBS mengajukan untuk membentuk Komite DAS Lamasi (KDL) di Kabupaten Luwu pada awal tahun 2009. Disiapkan oleh PSDA Luwu dan dilatih oleh beberapa LSM dan CDP, KDL secara resmi dibentuk pada tanggal 7 Juli 2010. Inaugurasi dihadiri oleh perwakilan Dewan Sumberdaya Air Provinsi dan Dewan Sumberdaya Air Nasional. KDL terdiri dari 4 perwakilan dari organisasi pemerintah, dan 7 individu, 3 di antaranya merupakan wakil Forum DASWalmas. Istilah KDL ini selama 3,5 tahun (sampai akhir 2013); fungsi utamanya adalah koordinasi, fasilitasi, perencanaan, mediasi konflik, dan memantau pembangunan sumberdaya air di DAS Lamasi di Kabupaten Luwu.

Tugas penting KDL termasuk berkoordinasi dengan TKPSDA dalam membentuk rencana strategis untuk WVS Pompengan-Larona dan memperluas aktivitas ke kabupaten lain di DAS Lamasi. Tugas yang juga penting adalah mengoordinasikan dengan pihak berwenang di DAS Rongkong untuk pengelolaan banjir di dataran banjir Lamasi-Rongkong di hilir.

II.3. Kondisi Sumberdaya Alam

Penggunaan lahan di DAS Lamasi adalah sebagai berikut: hutan lindung: 52%; hutan produksi: 10%; lahan pertanian, pemukiman dan lainnya: 35%; dan lahan basah dan mangrove: 3% (Badan Planologi Kehutanan, 2005). Secara umum, masyarakat lokal di DAS Lamasi menggunakan sumberdaya alam untuk aktivitas subsisten seperti bertani, berkebun, tambang pasir, nelayan dan budidaya rumput laut serta ikan. Produk utama adalah padi dengan produk sekunder coklat, kopi, dan buah-buahan (durian, rambutan dan langsung).

Perubahan yang sedang terjadi diidentifikasi berikut ini dan relevan dalam konteks pengelolaan DAS Lamasi.

- ◆ Deforestasi di bagian hulu DAS Lamasi yang menyebabkan rusaknya pada flora dan fauna. Ini menjadi perhatian penting bagi warga kedua desa, yang melihat



alat eksistensinya terpengaruh, dan aktivis lingkungan yang mengklaim bahwa beberapa spesies endemik berada di ambang kepunahan.

- ◆ Alokasi lahan dan konversi untuk tambang *galena*⁷, yang sedang dalam proses pemberian konsesi dan ijin operasi.
- ◆ Konversi bakau menjadi tambak ikan atau kolam rumput laut oleh pengusaha dari kota besar mengancam ekosistem bakau.
- ◆ Penduduk desa di daerah hutan hulu secara acak menebang pohon di hutan untuk membangun rumah. Yang lebih buruk adalah beberapa orang yang bekerja untuk cukong-cukong yang berada di kota besar. Cukong-cukong ini menyuplai alat produksi, seperti gergaji dan truk.
- ◆ DAS Lamasi adalah sumber air tunggal untuk sistem irigasi buatan pemerintah dan sistem irigasi lokal. Sistem irigasi buatan pemerintah dipertimbangkan sebagai tulang punggung di seluruh Kabupaten Luwu dan bahkan daerah di sekitarnya. Sistem ini dapat mengirigasi area seluas 10.306 ha (saat ini (2010) hanya sekitar separuh dari sistem yang beroperasi)
- ◆ Hasil hutan bukan kayu (seperti: rotan; kopi; resin; madu; obat-obatan herbal; gula aren; dan coklat) masih diproduksi dengan cara tradisional dan belum ada usaha untuk menambah nilai bahan baku. Tanpa usaha tersebut, produk agroforestri tidak akan berkontribusi secara signifikan dalam ekonomi lokal.
- ◆ Beberapa orang menambang pasir dan batu dari sungai untuk pendapatan tambahan. Hasilnya dijual di perusahaan kecil lokal atau pada kontraktor yang membangun jalan beraspal di daerah. Ini menjadi sumber tambahan untuk kontraktor.
- ◆ Beberapa sumberdaya potensial untuk dikembangkan adalah bambu dan spesies kayu keras (*hardwood*) yang berada di DAS. Sumberdaya yang belum optimal dimanfaatkan, belum memberikan nilai tambah untuk masyarakat. Fakta ini mengindikasikan bahwa tidak ada institusi untuk penguatan ekonomi masyarakat.

7 Pertambangan Galena di area seluas 400 ha di Walenrang Barat



DAERAH IRIGASI : PERIBDE PENDERYAN AIR TGL s/d NLM

WANTING :

NOBRIE NAMA SAORAN
 LUAS SAWAH IRIGASI (Mn)

TOTAL USULAN LUAS
 TANAMAN (Mn)

I T E M

(a) $Q_1 = Q$ DIPINU TERSEBUT	(+)	(+)	(+)
(b) $Q_1 = Q$ KEPERLUAN LAIN-LAIN	(+)	(+)	(+)
(c) $Q_h = Q$ HILANG	(+)	(+)	(+)
(d) $Q_s = Q$ SUPLESI	(+)	(+)	(+)
(e) $Q_b = Q$ BANGUNAN DADI	(+)	(+)	(+)

(f) FAKTOR (K) DITETAPKAN

BERIT AJU HANGUS DIALIRKAN

$(K) = (K) + (K) + (K) - (K)$ = (f/dad)

HEMAM KINYATAAN = (f/dad)

UNDA =
 BERIPUKAN =
 Y.L.B =





SAL. SEK. SALUPAO
LUAS 318.90 HA



Ketersediaan Air

Masih sedikit informasi yang tersedia tentang hidrologi, ekologi, ekosistem dan flora-fauna di DAS. Kekurangan data dan analisis menghambat pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan di DAS Lamasi oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

Curah hujan di DAS Lamasi berkisar antara 2.500 – 3.000 mm per tahun. April – September adalah bulan basah, sedangkan Oktober – Maret adalah bulan kering. (Sumber: website www.psdasulsel.org)

Ketersediaan analisis air oleh peneliti dari ITB, Abdulah Abid, menunjukkan bahwa debit tahunan Sungai Lamasi adalah sekitar 14 m³/s. (Abid, Abdullah, 2005)⁸.

Pembangunan sistem irigasi Lamasi dimulai setelah operasi Bendung Lamasi tahun 1981. Saat ini, bendungan tersebut berpotensi untuk memasok air pada area seluas 10.306 ha.

Kondisi Sungai

Rata-rata debit sungai sekitar 14 m³/s. Hujan deras di DAS Lamasi menyebabkan banjir bandang yang dapat terjadi sampai tiga kali per tahun. Di daerah hulu, banjir bandang disebabkan oleh tanah longsor dan membahayakan infrastruktur dan rumah-rumah di sepanjang tepi sungai. Di daerah hilir, Sungai Lamasi membanjiri lahan-lahan yang terletak rendah di Kecamatan Walenrang dan Lamasi, menenggelamkan rumah-rumah, persawahan, dan kebun kopi serta memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan dan ekonomi masyarakat. Setelah banjir, mengembalikan lahan yang tenggelam dapat

8 Informasi didapatkan dari website (<http://digilib.itb.ac.id>). Riset dilakukan pada tahun 2004-2005, di beberapa area di DAS Lamasi. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di perpustakaan ITB.

memakan waktu sampai satu minggu, dan lahan tidak bisa 100% kembali menjadi normal. Sementara menunggu banjir surut, petani tidak melakukan apa-apa; sebagian besar waktu dihabiskan di rumah. Selama banjir besar pada bulan September 2008, 7 desa tergenang: Pelalan, To' lemo, Pompengan, Pompengan Utara, Pompengan Pantai, Pompengan Tengah, dan Bulu Londong, mempengaruhi sekitar 9,000 orang (lihat populasi tahun 2009 di Appendix 3).

Banjir bandang dan tanah longsor membawa sedimen di daerah hilir yang mengendap tidak hanya di dataran banjir tetapi juga di badan sungai setelah banjir surut.

Sedimentasi di bagian hilir sungai juga terjadi karena pengambilan air di bendungan. Bendungan di hilir membuat aliran sungai berkurang, membawa banyak muatan sedimen dan menyebabkan sedimentasi di badan sungai.

Daerah tengah dan hilir sungai mengalami kekeringan di musim kemarau. Selama musim kemarau, air asin dari teluk mengintrusi ke sungai, mempengaruhi aktivitas nelayan dan budidaya rumput laut.

Bendungan di bagian tengah Lamasi, yang dibangun tahun 1981, adalah infrastruktur utama yang digunakan untuk memasok sistem irigasi di saluran irigasi Lamasi Kiri. Di beberapa tempat sepanjang daerah hilir, tanggul-tanggul sungai dibangun oleh pemerintah untuk mencegah erosi sungai. Tanggul-tanggul tersebut, selain infrastruktur jalan, merupakan penghambat air banjir drainase lokal maupun sungai.

Tidak ada kasus pencemaran serius yang dilaporkan. Keruhnya air membuat air menjadi tidak layak diminum. Di musim kemarau, air tanah di hilir menjadi asin. Sedangkan di musim hujan, air tanah di bagian tengah dan hilir menjadi keruh.

Di bagian lebih rendah di DAS, Sungai Lamasi banyak berkelok-kelok dan hal ini berkontribusi pada erosi di tepi sungai serta kondisi yang tidak stabil di tepi sungai. Pada saat banjir, Sungai Lamasi terhubung dengan Sungai Rongkong, membentuk satu kombinasi dataran banjir. Untuk menemukan solusi bagi sungai-sungai dan masalah banjir ini dibutuhkan sebuah pendekatan menyeluruh pada kedua sungai.

IV

Produksi Dan Aktivitas Penggunaan Air

Bagian ini menggabungkan aktivitas produksi yang berhubungan dekat dengan ketersediaan dan kualitas air di DAS Lamasi.

IV.1. Agroforestri

Bagian hulu DAS Lamasi memiliki area hutan yang cukup banyak dibandingkan di daerah hilir. Kontur yang curam dan peka terhadap tanah longsor-bahkan aktivitas manusia sekecil apapun akan berpengaruh. Konservasi lahan menjadi prioritas di area ini. Secara umum, hulu adalah daerah pertanian produktif yang menjadi area ekonomi penting di Palopo serta daerah di sekitarnya. Produk-produk termasuk durian, rambutan dan langsung. Pohon-pohon ini dapat juga digunakan untuk konservasi tanah yang dapat menjaga nilai ekonomi lahan.

Praktek pertanian tersebut sesuai dengan karakteristik daerah pegunungan. Faktor eksternal, bagaimanapun, mengubah praktek pertanian tradisional yang dapat membahayakan stabilitas lingkungan di daerah tersebut. Sebagai contoh, pertanian tradisional tidak menggunakan alat berat; petani hanya memiliki cangkul, parang untuk memotong dan tangki (untuk menyemprot pestisida). Tipe praktek pertanian yang dilakukan lebih menyerupai pada eksploitasi hutan sekunder.

Petani di daerah hulu adalah semi-subsisten, mereka tidak selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membeli. Petani mendapatkan bahan makanan pokok dengan

menanam sayuran dan padi. Air untuk konsumsi sehari-hari didapatkan dari sungai yang mengalir di belakang rumah. Air yang dapat diminum dialirkan ke rumah melalui pipa. Air yang didapatkan jernih dan tersedia sepanjang tahun. Sungai tidak pernah kering meskipun selama musim kemarau.

Petani mengharapkan pendapatan lebih baik dengan naiknya harga kopi dan coklat. Beberapa petani berencana mengalihkan lahan pertaniannya menjadi kebun coklat monokultur menggunakan praktek yang tidak ramah lingkungan seperti menyemprotkan pestisida untuk mengendalikan hama (yang banyak ditemukan di kebun kopi di Sulawesi). Sisa pestisida dapat terbawa ke sungai dan mencemari daerah hilir. Dari sudut pandang hidrologi, sistem agroforestri lebih baik dari pada kebun kopi monokultur. Faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi aktivitas agroforestri dan mata pencaharian, degradasi hutan karena perambahan dan pembalakan liar.

IV.2. Pertanian Padi di Lahan Basah

Pertanian padi adalah mata pencaharian utama (80%) untuk sebagian besar masyarakat di Luwu (BPS Luwu, 2009). Tabel I berikut adalah ringkasan data dari tiga responden petani irigasi dan petani non-irigasi di DAS Lamasi.

Tabel 1. Perhitungan biaya produksi dan pendapatan petani padi non-irigasi dan irigasi di DAS Lamasi.

Petani	Input per ha											
	Luasan Lahan (ha)	Bibit (IDR)	Traktor (IDR)	Peralatan Pertanian	Air (IDR)	Lahan (IDR)	Urea (IDR)	Foska / Adika (IDR)	Kimia / Postik (IDR)	Penanaman (IDR)	Panen (IDR)	Doros (IDR)
Bapak Yangsen ¹	0.5	130.000	750.000	Cangkul, Arit ^A	400.000	NA	390.000	130.000	30.000	500.000	240.000	1.600.000
Bapak Jardin ²	1.25	64.000	36.000	Cangkul, Arit ^A	160.000	NA	416.000	320.000	12.000	384.000	1.632.000	3.072.000
Bapak Pong Labba ³	2.25	177.778	800.000	Cangkul, Arit ^A	44.444	NA	133.333	57.778	6.667	444.444	868.889	1.635.556

Petani	Total Input Rp per ha (IDR)	Output		Pendapatan Bersih (IDR)	Produktivitas per ha	
		Padi dalam karung (115 kg/karung)	IDR		Padi (kg)	IDR (Rp.2100/kg)
Bapak Yangsen ¹	4.170.000	25	6.037.500	3.952.500	5,750	12.075.000
Bapak Jardin ²	6.096.000	120	28.980.000 ^B	3.466.250	11,040	23.184.000
Bapak Pong Labba ³	4.168.889	195	47.092.500	37.712.500	9,890	20.769.000

A: Setiap petani memiliki cangkul sebagai peralatan dasar. Petani butuh bertahun-tahun untuk membeli cangkul baru.

B: Lihat tabel perhitungan pendapatan Pak Jardin

1. Bapak Yangsen tinggal di Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur di bagian tengah DAS Lamasi, yang berbatasan dengan desa-desa di bagian hulu. Yangsen bergantung pada air hujan dan irigasi kecil dari buangan irigasi untuk sawahnya. Ia memiliki 0.5 ha sawah padi. Dalam laporan ini Yangsen dikategorikan sebagai petani non-irigasi.

2. Bapak Jardin tinggal di Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur. Desa ini terletak di bagian tengah DAS Lamasi dan berbatasan dengan desa-desa di bagian hulu. Sebagian besar wilayah ini mendapatkan irigasi dari Bendung Lamasi. Sayangnya Jardin tidak memiliki akses ke sistem irigasi dan karena itu dikategorikan sebagai petani non-irigasi. Ia bekerja sebagai petani penggarap di 1.25 ha sawah milik orang lain.

3. Bapak Pong Labba tinggal di Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi. Desa ini terletak di bagian tengah DAS Lamasi, berbatasan dengan desa-desa di bagian hulu. Kawasan ini mendapat aliran air irigasi melalui Bendung Lamasi, begitu juga Pak Pong Labba yang mendapat aliran irigasi untuk 2.25ha lahan padi miliknya.

Dengan memperhatikan ketersediaan air, tiga tipe sawah di sekitar DAS Lamasi dibagi menjadi:

- Sawah padi basah yang diirigasi dengan sistem irigasi buatan pemerintah di kiri dan kanan dari bagian tengah DAS Lamasi. Air diperoleh dari Bendungan Lamasi
- Sawah padi basah yang diirigasi dengan sistem irigasi lokal di hilir Lamasi. Air didapat dari aliran kembali dari sistem irigasi yang dibangun pemerintah; dan
- Sawah kering (akan dibicarakan pada agroforestri)

Bagian di bawah ini berhubungan dengan dua tipe pertama dari sistem pertanian sawah basah.

IV.2.1. Sistem Irigasi yang Dibangun Pemerintah

Bendungan Lamasi menyediakan air untuk daerah irigasi: Lamasi Kiri di sebelah kiri bendungan mencakup area seluas 5.503 ha. (lihat bab II.2). Saluran irigasi Lamasi Kiri digunakan oleh 53 P3A yang tergabung dalam 4 GP3A. Saat ini, sistem irigasi yang dibuat pemerintah dikelola oleh Dinas PSDA Luwu, sejauh saluran primer dan sekunder bersangkutan. Kelompok petani bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan operasional saluran tersier.

Petani di sistem irigasi berpikir bahwa P3A membawa sedikit keuntungan untuk mereka. Selama pengumpulan data dan wawancara, banyak petani berkata bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat dari P3A; dari hasil pengamatan ditemukan bahwa jumlah petani yang tidak mendapat cukup air melebihi jumlah petani yang cukup mendapat air. Seorang responden pengumpulan data LA dan AA (Kahman H., R. Mustikasari., 2011), mengatakan bahwa air tidak terbagi merata, terutama di saat musim kemarau. Kekurangan air ini menghambat pertumbuhan padi. Responden berharap bahwa dengan pasokan air yang baik, ia dapat memanen setidaknya tiga kali per tahun dan bukannya dua kali. Dengan kondisi yang baik, dua kali panen dimungkinkan dengan hasil sekitar 5.900 kg/ha.

Panen padi adalah sumber penghidupan utama untuk petani. Gagal panen terutama disebabkan karena irigasi yang tidak stabil atau serangan hama. Petani dapat merugi sampai dengan 50% - 70% dari jumlah panen normal karena hama dan tikus. Selama musim penghujan, banjir menggenangi dan membanjiri banyak lahan pertanian.

IV.2.2. Irigasi di Hilir Lamasi

Di daerah hilir saluran irigasi Lamasi Kiri petani menggunakan aliran balik dari sistem irigasi yang dibangun pemerintah untuk mengairi sawahnya. Bagi hasil di daerah ini sudah menjadi praktek yang biasa dilakukan. Sebagai contoh, seorang responden, seorang petani, menerima perbandingan 1:6 dari jumlah panen: satu sak untuk petani dan enam sak untuk pemilik lahan. Dalam kasus ini, pemilik lahan menanggung seluruh biaya produksi.

Saluran irigasi di daerah hilir tidak berfungsi baik. Saluran-saluran ini memasok air hanya jika sistem irigasi yang dibangun pemerintah memiliki arus balik. Pasokan irigasi yang tidak stabil menyebabkan penurunan hasil karena padi tidak tumbuh dengan baik dalam kondisi tersebut.

IV.3. Penangkapan Udang dan Ikan, serta Budidaya Ikan

Nelayan di daerah hilir Lamasi terbagi dalam dua kelompok: nelayan profesional; dan petani yang beralih menjadi nelayan untuk mengganti kehilangan pendapatan karena lahan pertanian mereka yang rusak karena banjir.

Kesulitan teknis yang dihadapi nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan adalah kurangnya peralatan. Sebagian besar petani masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap udang dan ikan. Cara tradisional tidak memberikan hasil yang optimal, namun ramah lingkungan dan tidak menyebabkan pencemaran.

Jumlah hasil tangkapan tidak menentu dan berfluktuasi tergantung pada kondisi sungai. Hal ini nelayan tidak mendapatkan penghasilan yang tetap dan tidak menentu. Karena hal itu, nelayan meminjam uang kepada lintah darat. Diasumsikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tidak stabil.

Faktanya, sedikit nelayan yang memiliki sumber pendapatan alternatif. Banyak nelayan memiliki lahan pertanian, namun sudah tidak produktif karena banjir. Sebagai contoh, salah satu responden memiliki lahan tidak produktif seluas 6 ha sedangkan yang lainnya memiliki setengah ha. Mereka berharap dapat segera kembali bekerja setelah lahan mereka kembali produktif. Nelayan yang memiliki lahan 6 ha, sebagai contoh, berharap dapat menanam coklat, jagung, dan sayuran. Hal ini akan menjadi sumber pendapatan alternatif yang penting jika suatu hari pendapatan dari menangkap ikan tidak lagi mencukupi.

Nelayan mendapatkan air dari sumur.

Jenis udang yang banyak ditangkap adalah Udang Gala (*Macrobrachium rosenbergii*), yang bervariasi beratnya; beberapa dapat mencapai 300 gram atau lebih. Udang yang lebih kecil yaitu udang wato, rongka (udang seukuran ibu jari) dan Bongko paku⁹, yang lebih kecil dari jenis yang lain. Biasanya, dalam penangkapan hasil yang didapat berukuran sama.

Dalam sehari, seorang nelayan dapat menangkap 10-20 kg udang kecil (senilai Rp.8000, /kg) dan atau 2-3 kg udang air tawar raksasa (senilai Rp.40.000/kg). Nelayan mendapat penghasilan kotor maksimum Rp.80.000 – Rp.160.000 per hari. Jika kondisi sungai tidak bagus, hasil tangkapan akan rendah. Ketika hasil tangkapan rendah, hasil tangkapan tidak dijual tetapi digunakan untuk konsumsi sendiri.

Selama banjir –yang terjadi sekitar tiga kali setahun dan biasanya berlangsung selama 3 hari– hasil tangkapan bervariasi dari 2 sampai 5 kg udang kecil per hari. Ketika debit sungai terlalu tinggi atau terlalu rendah, hasil tangkapan menurun. Nelayan juga mengalami masalah lain, yaitu kurangnya peralatan modern. Hampir semua nelayan menggunakan peralatan tradisional.

Selain menangkap ikan, banyak orang di daerah hilir membudidayakan ikan di kolam-kolam, memanfaatkan air sungai dan rawa-rawa di sekitar mulut sungai. Hal ini menjadi praktek umum pertanian rumput laut, hanya beberapa yang membuat kolam khusus untuk budidaya ikan. Terdapat kontradiksi informasi luas kolam untuk budidaya ikan. Berdasarkan 'Luwu Dalam Angka 2008' yang diterbitkan oleh BPS tahun 2009, kolam ikan di Kecamatan Walenrang Timur dan Lamasi Timur sekitar 242 sampai 850 ha. Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Luwu, menyebutkan sekitar 1.945 ha pertanian rumput laut di Walenrang Timur dan 1.942 di Kecamatan Lamasi Timur (yang digunakan untuk kombinasi dengan memelihara ikan), dan 107 ha perikanan air tawar eksklusif (tahun tidak diketahui).

IV.4. Budidaya Rumput Laut

Beberapa dusun di daerah pesisir bergantung sepenuhnya pada rumput laut, yaitu: Dusun Tambak, Pompengan, Pompengan Pantai and Marobo; semuanya berlokasi di desa Lamasi Pantai. Masyarakat juga mendapat ikan disela rumput laut untuk mendapat penghasilan tambahan dan untuk mengendalikan lumut dan keong.

⁹ Ini adalah nama lokal untuk jenis udang kecil. 'Bongko dalam bahasa lokal adalah udang.

Areal budidaya rumput laut terkena banjir secara periodik. Banjir menurunkan produksi pertanian karena jumlah air asin menurun. Perlu waktu sekitar satu minggu untuk lahan pertanian rumput laut kembali normal setelah banjir.

IV.5. Pertambangan Tanah

Pertambangan galena dilakukan di Desa Ilan Batu di bagian hulu DAS Lamasi. Bijih ini diperkirakan mengandung Galena (Pb), Tembaga (Cu), Sphalerit (Zn) dan mungkin Emas (Au) dalam jumlah kecil. Total perkiraan cadangan 1,51 juta ton. Dengan perkiraan 8.000 ton diproduksi per bulan, pertambangan akan berjalan selama 15 tahun (per 2010). Pemrosesan dilakukan di daerah hilir di Desa Harapan.

Ijin diberikan akan efektif selama 20 tahun, termasuk 2 tahun untuk persiapan dan konstruksi. Luas area konsesi adalah 377 ha. Aktivitas-aktivitas eksploitasi (ijin untuk 18 tahun) diharapkan dimulai tahun 2013.

Proses eksploitasi meliputi:

- ◆ pengupasan tanah (deforestasi);
- ◆ pengeboran untuk menciptakan lubang dan selanjutnya peledakan; dan
- ◆ mengangkut bijih ke daerah pembuangan, atau pabrik untuk pengolahan.

Proses meliputi tahap sebagai berikut: penghancuran, penggilingan, pengentalan tailing, pencampuran reagent, pencucian seng dan timah dan proses penyimpanan berkonsentrasi.

Tidak ada informasi yang tersedia tentang konsekuensi lingkungan dari tahapan ini dan besarnya rehabilitasi yang harus ditanggung perusahaan tambang.

Berdasarkan keterangan perusahaan tambang, 70% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, namun berapa jumlah tenaga kerja yang akan direkrut masih belum diketahui.

IV.6. Penambangan pasir dan kerikil di Sungai (Pertambangan Galian C)

Dari perspektif legal, pertambangan galian C harus melakukan AMDAL sebelum beroperasi. Analisis ini harus dilakukan oleh Dinas Pertambangan Daerah (Kabupaten Luwu), Perencanaan Spasial dan Pemukiman, Infrastruktur, PSDA, Pengelolaan Dampak

Lingkungan, dan Dinas Pertanahan Nasional. Hanya jika keenam dinas tersebut memberikan persetujuan maka ijin dapat dikeluarkan.

Kepala Dinas Pertambangan menjelaskan bahwa perusahaan pertambangan biasanya melakukan dua tipe eksploitasi. Pertama adalah eksploitasi manual menggunakan sekop dan karung untuk mengangkut material yang biasanya dilakukan oleh pekerja lokal. Kedua adalah eksploitasi menggunakan mesin, seperti eskapator, yang mengambil pasir dari dasar sungai.

Pemantauan terhadap aktivitas-aktivitas pertambangan galian C ditetapkan dalam Perda No. 27/1/2010 tentang Pembentukan Tim Integrasi untuk Mengontrol Pertambangan Ilegal di Kabupaten Luwu (Kabupaten Luwu, 2010). Tim ini terdiri dari 13 anggota, meliputi perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah; Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Pertambangan Daerah; Kecamatan, Kepolisian Daerah dan Desa.

Tugas dari tim ini meliputi:

1. melakukan penilaian lapangan;
2. mengontrol, menutup atau melegalkan aktivitas-aktivitas pertambangan liar;
3. melakukan riset dan studi, evaluasi, dan menyediakan rekomendasi teknis dan lingkungan untuk digunakan sebagai dasar Ijin Usaha Pertambangan (IUP); dan
4. advokasi penambang liar untuk membuat ijin penambangan legal sesuai dengan peraturan yang berlaku (lokasi pertambangan seharusnya memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan)

IV.7. Hidropower

Pada tahun 2009, Kementerian ESDM membangun mikro hidro 30 kV di Desa Ilan Batu. Dinas ESDM daerah hanya memiliki sedikit informasi tentang sumber dana hibah yang didapat.

IV.8. Pasokan Air Masyarakat

Masyarakat di kawasan DAS Lamasi ini mengandalkan air tanah (mata air dan sumur) untuk konsumsi (air minum). Untuk kebutuhan domestik lain, seperti mencuci, air Sungai Lamasi masih bisa digunakan. Di bagian DAS yang lebih hilir, berlokasi di dekat laut, air tanah menjadi semakin asin selama musim kemarau. Ketika hal ini terjadi, masyarakat yang mampu akan mengonsumsi air kemasan, sedangkan yang lain tetap menggunakan air asin tersebut.





V

Masyarakat dan Kehidupannya

Kemiskinan adalah permasalahan utama di Kabupaten Luwu dengan lebih dari 85% populasi masyarakat hidup dalam kemiskinan (BPS Luwu, 2009), tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di sekitar DAS Lamasi. Pemerintah belum menemukan solusi terpadu untuk permasalahan ini. Data resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu seperti yang tertulis dalam “Luwu Dalam Angka, 2008” (BPS Luwu, 2009) menunjukkan bahwa Kecamatan Lamasi, yang mencakup 1,4% dari total luas Kabupaten Luwu, adalah daerah dengan populasi terpadat yaitu 465 orang/km². Harus dicatat bahwa daerah ini adalah daerah tujuan transmigrasi.

Tidak ada informasi yang memadai tentang profesi dari 60.000 orang yang tinggal di DAS Lamasi. “Luwu Dalam Angka 2008” (BPS Luwu, 2009), membagi menjadi lima kategori mata pencaharian utama di Kabupaten tersebut.

1. Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan: 61.811 laki-laki dan 25.367 wanita: dengan total angka mencapai 87.178 orang (73% dari total penduduk yang bekerja).
2. Industri pengolahan: laki-laki 2.944 dan wanita 1.707 dengan jumlah total mencapai 4,651 (3,9 %)
3. Restoran dan hotel: laki-laki 4.126 dan wanita 9.678, dengan jumlah total mencapai 13.804 (11,5%)
4. Jasa masyarakat: laki-laki 5.933 dan wanita 3.267, dengan jumlah total mencapai 9.200 (7,7%)
5. Lainnya: pekerja kantoran, transportasi, finansial dan asuransi, persewaan kantor/gedung, sewa tanah dan jasa perusahaan: laki-laki 4.557 dan wanita 567, dengan jumlah total mencapai 5.124. (4,3%)

Total populasi di Kabupaten Luwu adalah 325.000 jiwa pada tahun 2008 (159.000 laki-laki dan 166.000 perempuan). Umur produktif (>15+) sekitar 206.000 (BPS Luwu, 2009).

Sebagian besar masyarakat hidup di tingkat subsisten dengan ketidakpastian pendapatan dan gagal panen yang disebabkan banjir serta kekeringan yang sering datang dan tidak dapat diprediksi. Sebab utama dari bencana alam ini adalah kemungkinan hilangnya tutupan hutan di daerah hulu.

Masyarakat di daerah tengah dan hilir kekurangan air yang berkualitas baik. Untuk air bersih, mereka sangat mengandalkan sumur, yang sering keruh saat banjir dan musim penghujan. Masyarakat hulu mengambil air bersih dari mata air, menggunakan selang plastik atau bambu untuk menyalurkan air.





VI

Proyek Saat Ini dan Yang Direncanakan

Saat ini, tahap penyelesaian saluran irigasi Lamasi Kanan sedang berlangsung, didanai oleh BBWS Pompengan-Jeneberang. PSDA Provinsi hanya bekerja untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Proyek BBWS saat ini adalah untuk memperbaiki saluran tanah menjadi saluran permanen di Walenrang dan Walenrang Timur.

Sebuah perusahaan dari Maluku memperbaiki saluran irigasi Lamasi Kiri menjadi dua tingkat pada tahun 2002, masing-masing dengan biaya anggaran lebih dari 14 miliar rupiah. Target tahap pertama adalah perbaikan dan perawatan tepi sungai rawa dan wilayah pesisir; target tahap kedua adalah perbaikan dan perawatan irigasi dan drainase. PSDA Luwu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam koordinasi aktivitas-aktivitas ini, dan berusaha mencari informasi dari BBWS Pompengan-Jeneberang.

Pada tahun 2007, proyek pemukiman dibangun di Desa Ilan Batu Uru di daerah hulu, membuka sejumlah luas hutan di daerah tangkapan air. Selama proyek, beberapa rumah dibangun untuk para transmigran dari Pulau Jawa dan masyarakat lokal dengan perbandingan 75%-25%. Proyek ini telah berakhir seiring advokasi dari LSM lokal (AMPERA, Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat; bukan PBS). Mahasiswa secara aktif memperhatikan pengalihan fungsi lahan dan mendampingi para transmigran. Para transmigran hidup dalam kesengsaraan. Pertama, mereka tidak mengharapkan daerah yang akan mereka tinggali berada di wilayah hulu, yang jauh dari desa. Mereka tidak disambut baik oleh masyarakat lokal yang mengklaim tanah yang dialokasikan untuk proyek transmigrasi adalah tanah mereka. Para transmigran menjadi terlantar dan harus

tinggal di kantor transmigrasi selama mereka tidak memiliki uang untuk kembali ke daerah asal. Dengan advokasi dari mahasiswa, mereka dikirim kembali ke daerah asal dan proyek tersebut dihentikan.

Proyek lain yang sedang berlangsung adalah proyek normalisasi sungai di Desa Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur. Berdasarkan PSDA Luwu, normalisasi sungai atau pelurusan akan mengurangi banjir atau penggenangan. Sebelum menjalankan proyek normalisasi, PSDA Luwu melakukan sosialisasi, termasuk kepada masyarakat tentang penyebab banjir, seperti pemblokiran arus sungai yang berkelok. PSDA Luwu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya akan terkena imbas normalisasi dan akan menerima kompensasi berdasarkan paragraf 2(a) Artikel 17 Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Koridor Air dan Sungai, Area Penggunaan Sungai, Pengendalian Sungai, dan Bentuk Sungai (Departemen Pekerjaan Umum, 1993).

Biaya proyek normalisasi ini sangat tinggi, dan oleh karena itu Pemda meminta tambahan bantuan dari APBD I dan APBN. Namun sampai hari ini, APBD I dan APBN mengakhiri pendanaan sehingga Pemda meninggalkan proyek yang belum selesai tersebut.

Selain normalisasi, PSDA Luwu membangun tanggul setinggi 2 meter sepanjang 2 km. Tanggul ini dibangun dari tanah liat. Tanah ditumpuk, diratakan menggunakan alat berat, seperti penggilas (*roller*). Konstruksi tanggul dibuat di Desa Pelalan dan To'lemo.

VII

Identifikasi Permasalahan

Bab ini menyajikan dua tipe identifikasi permasalahan. Bab VII.1 memberikan Ringkasan masalah terkait air yang diidentifikasi pada field work oleh tim CDP, yang berdasarkan pengetahuan masyarakat lokal. Bab VII.2 menyajikan hasil dari FGD yang dilaksanakan tahun 2008. Pendekatan yang dipakai dalam tulisan Bagian VII.1 adalah hasil seleksi yang dilakukan Tim PBS dan berdasarkan interpretasi wawancara mendalam dengan petani dan pengguna air lainnya menggunakan Panduan AL&AA. Bagian VII.2 adalah ringkasan permasalahan yang didapat dari FGD yang dilakukan PBS tahun 2007 (YBS, 2007), tidak dilakukan pendalaman masalah atas setiap poin yang dituliskan.

VII.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Pengamatan Tim PBS

Bab ini menyajikan identifikasi masalah utama terkait air di DAS Lamasi berdasarkan Field Report Lamasi ((Kahman H., R. Mustikasari., 2011). Identifikasi permasalahan terbatas pada fenomena yang terkait langsung dengan air dan dampak langsung serta kemungkinan penyebabnya. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah pokok dalam analisis masalah yang lebih lengkap yang mungkin mencakup masalah yang tidak secara langsung terkait air (misalnya masalah ketersediaan lahan dan transportasi) dan mungkin bisa menyediakan solusi yang mungkin dan hambatan untuk menyelesaikannya.

Secara umum, perhatian masyarakat secara keseluruhan adalah semakin buruknya kondisi Sungai Lamasi. Hal ini mempunyai banyak aspek seperti yang dibuktikan dalam wawancara dengan masyarakat di lapangan. Aspek utama meliputi banjir yang meningkat, meningkatnya kekurangan air, dan debit air yang semakin tidak stabil. Selain itu, kualitas air bisa menjadi isu yang berkembang.

Banjir

- ◆ Dampak banjir sangat intensif seperti yang dikonfirmasi oleh semua responden. Walaupun begitu, tidak menjadi jelas apakah ini disebabkan oleh banjir yang meningkat, memburuknya kondisi drainase (misalnya karena konstruksi jalan) atau fakta bahwa area terdampak memiliki nilai yang meningkat (perubahan penggunaan lahan). Sepertinya dianjurkan untuk menemukan informasi lebih tentang asal banjir (sungai dan/atau saluran drainase yang rusak) dan kerusakan karena banjir. Penilaian kerusakan dapat dilakukan melalui sebuah pemetaan banjir: *overlay* peta daerah tergenang dan peta yang menunjukkan tata guna lahan, pemukiman dan aktivitas-aktivitas ekonomi.
- ◆ Permasalahan lain selama banjir adalah kekeruhan air yang mempengaruhi budidaya rumput laut.

Kekeringan

- ◆ Berkurangnya debit air sungai yang semakin hari semakin meningkat: kekurangan air berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini bisa menjadi permasalahan di masa mendatang ketika saluran irigasi Lamasi Kanan dan lebih banyak air diambil dari sungai dari pada kondisi saat ini. Hal ini juga akan memiliki konsekuensi.
- ◆ Peningkatan kekurangan air irigasi di saluran irigasi dan terutama di daerah di bawah irigasi lokal dari buangan Saluran Irigasi Lamasi Kiri.
- ◆ Rendahnya deras aliran arus air sungai juga akan mengakibatkan meningkatnya intrusi air laut ke lahan-lahan pertanian di daerah hilir. Salinasi sumur dan lahan budidaya rumput laut selama musim kemarau menjadi masalah bagi masyarakat lokal. Masalah-masalah tersebut secara pasti terus meningkat: konsentrasi garam lebih tinggi, durasi yang lebih lama dan masih banyak lagi.
- ◆ Nelayan, khususnya nelayan udang sungai di kawasan hilir mengeluh bahwa arus sungai semakin tidak stabil sepanjang tahun Yang berdampak pada hasil tangkapan dan merugikan mereka.
- ◆ Kualitas air tidak menjadi isu yang signifikan. Masalah yang ada meliputi kekeruhan (pertanian rumput laut) dan intrusi air laut (pasokan air dan pertanian rumput laut). Hal ini secara dramatis akan berubah di masa mendatang setelah penyelesaian saluran irigasi Lamasi Kanan (meningkatnya intrusi air laut) dan aktivitas tambang.
- ◆ Deforestasi dipercaya sebagai penyebab penting meningkatnya frekuensi banjir, semakin kecilnya aliran air dan kondisi sungai tidak stabil.

VII.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan FGD PBS Tahun 2008

Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Konservasi DAS Lamasi diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah di DAS. Lambatnya implementasi Perda, mendorong PBS melakukan FGD pada tahun 2008 untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal (YBS, 2007). Berikut ini adalah daftar permasalahan yang berhasil diidentifikasi:

- Terbatasnya informasi tentang DAS Lamasi utamanya aspek ekonomi, hidrologi, ekologi, arkeologi, ekosistem, aspek sosiokultural, situs budaya, flora dan fauna, dll.
- Konflik sumberdaya alam diantara masyarakat lokal (air, lokasi tambang, kayu, dll).
- Produk lokal (rotan, kopi, resin, lebah madu, obat-obatan herbal, gula aren, coklat) belum dikelola secara optimal.
- Menipisnya sumberdaya ikan di hilir DAS Lamasi dan Rongkong.
- Tidak adanya sinergi antara para pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, LSM, akademisi).
- Konsesi tambang di beberapa bagian DAS.
- Pengelolaan yang buruk dan pemanfaatan pertambangan pasir dan kerikil, yang berkontribusi terhadap degradasi ekosistem waduk.
- Tidak adanya pengelolaan terpadu antara DAS Lamasi dan DAS Rongkong.
- Kesulitan dalam memulai negosiasi antara para pemangku kepentingan karena kendala administratif;
- Tumpang tindih kebijakan (termasuk perencanaan tata ruang);
- Tidak jelasnya tanggung jawab dan kewenangan berbagai lembaga pemerintah dalam pengelolaan DAS.



Salang
Deli Yandi KAU

RAT

KABUPATEN
IYAN

AY BAI

SUKSES
TELE

VIII

Saran Untuk Aksi

Berdasarkan identifikasi masalah terkait air di bagian VII.1., tindakan berikut tampak relevan dan direkomendasikan ke KDL untuk dipertimbangkan.

- ◆ Laporan dan identifikasi masalah di sini adalah hanya sebuah langkah awal pengelolaan DAS Lamasi. Analisis masalah yang lebih detil direkomendasikan dibuat bersama sebagai langkah lanjutan implementasi konsep Pendekatan Negosiasi (NA) dan pencarian alternatif solusi yang memungkinkan. Analisis Permasalahan yang ditulis dalam laporan ini bersifat sementara - dapat digunakan sebagai panduan untuk mengumpulkan data lebih komprehensif menggunakan Panduan AL&AA serta mengumpulkan lebih banyak informasi dan peta; seperti kondisi fisik (topografi/hidrologi), jalan, pemukiman, penggunaan lahan, dan tutupan lahan.
- ◆ Solusi untuk masalah banjir di hilir DAS Lamasi memerlukan pendekatan yang cermat dan hanya bisa diputuskan setelah dilakukan analisis menyeluruh mencakup DAS Rongkong dan memasukkan analisis yang lebih baik tentang kondisi drainasenya. Analisis lain yang harus dipertimbangkan tentang peta kawasan banjir dan apa penyebabnya. Beberapa ahli yang menguasai penanganan banjir harus dilibatkan untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan intervensi fisik dan non-fisik yang mungkin dilakukan.
- ◆ Informasi tentang akitifitas tambang dan dampaknya untuk lingkungan dan sumber daya air harus lebih banyak didapatkan. Disarankan juga untuk berkonsultasi dengan sejumlah ahli yang bisa memberikan pendapat yang independen dari perusahaan tambang dan dinas pemerintah yang terkait dalam isu tambang. Pertambangan dan prediksi dampaknya pada sumber daya air memerlukan perhatian khusus dan segera.
- ◆ Perencanaan dan pelaksanaan normalisasi sungai harus berdasarkan studi mendalam terkait persoalan banjir dan dampak dari intervensi terhadap ekosistem serta seluruh aktor dan pemangku kepentingan yang ada di DAS Lamasi.



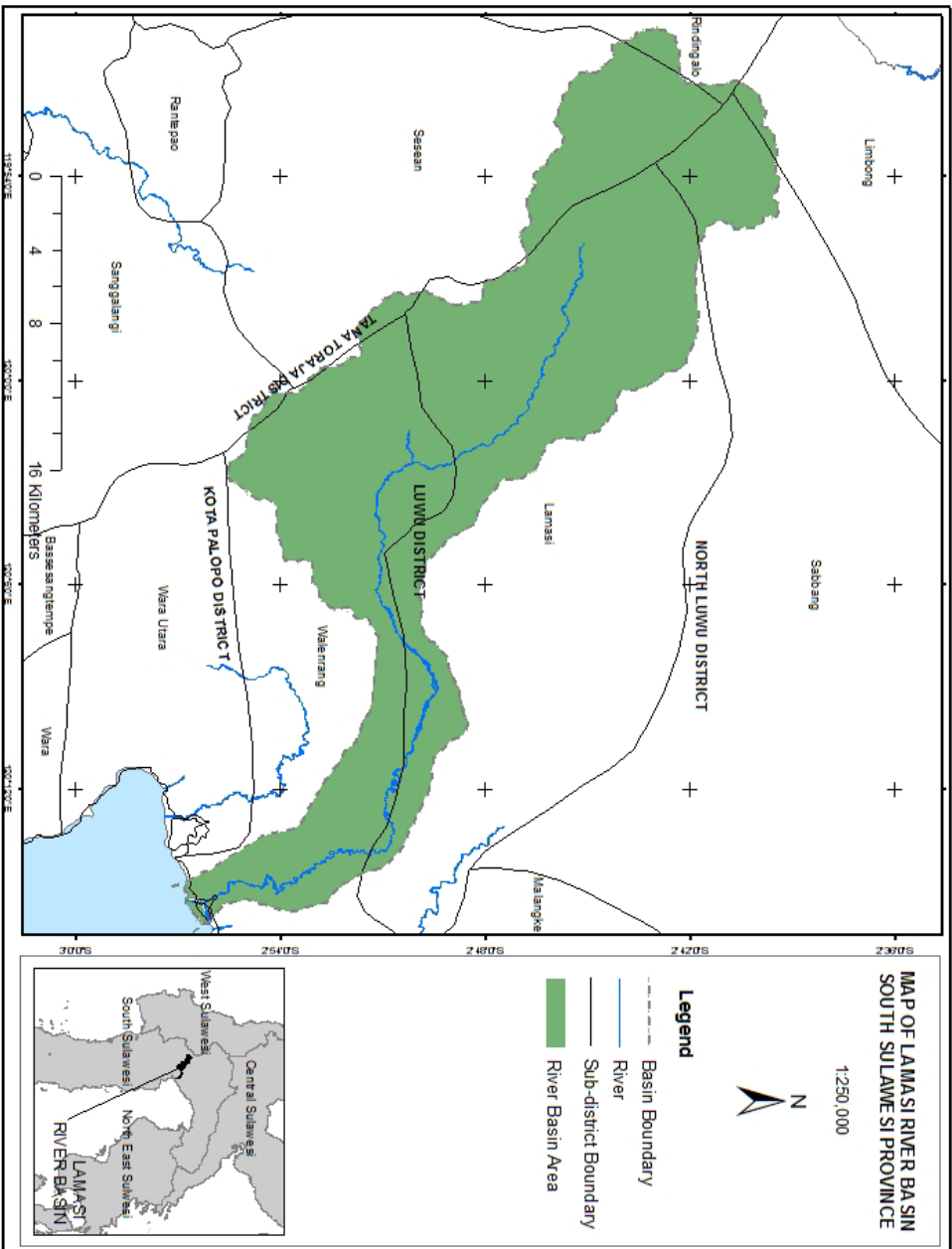
Daftar Pustaka

- Abid, Abdullah. 2005.** A Study Of Low Discharge Analysis For Water Resource Development Of Lamasi River Basin In Pompengan Larona Watersheds South Sulawesi Province. Department of Civil Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB). Bandung.
- Andriansyah O. dan Mustikasari R., 2011a.** Case Description of the Air Bengkulu River Basin. Telapak. Bogor.
- Andriansyah O. dan Mustikasari R., 2011b.** Potret Masyarakat dan Aktivasnya di DAS Air Bengkulu. YUB. Bengkulu.
- Badan Planologi Kehutanan, 2005.** Statistik Kehutanan on Table I.I.I.B. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Serta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)/ Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem Based on Forestry Ministerial Decree on the Designation of Provincial Forest Area. Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem and Forest Land Use by Consensus: Departemen Kehutanan Indonesia, Jakarta
- BAPPEDA Sulawesi Selatan, 2009.** Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2009 tentang Tata Ruang Regional Sulawesi Selatan 2009 – 2013. Makasar.
- BPS Luwu, 2009.** Kabupaten Luwu dalam Angka 2008. Biro Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Department Belopa, Luwu.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2006.** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 11A/PRT/M/2006; Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1993.** Keputusan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Koridor Sempadan Sungai, Areal Pemanfaatan Sungai, dan Pengontrolan Sungai. Jakarta.

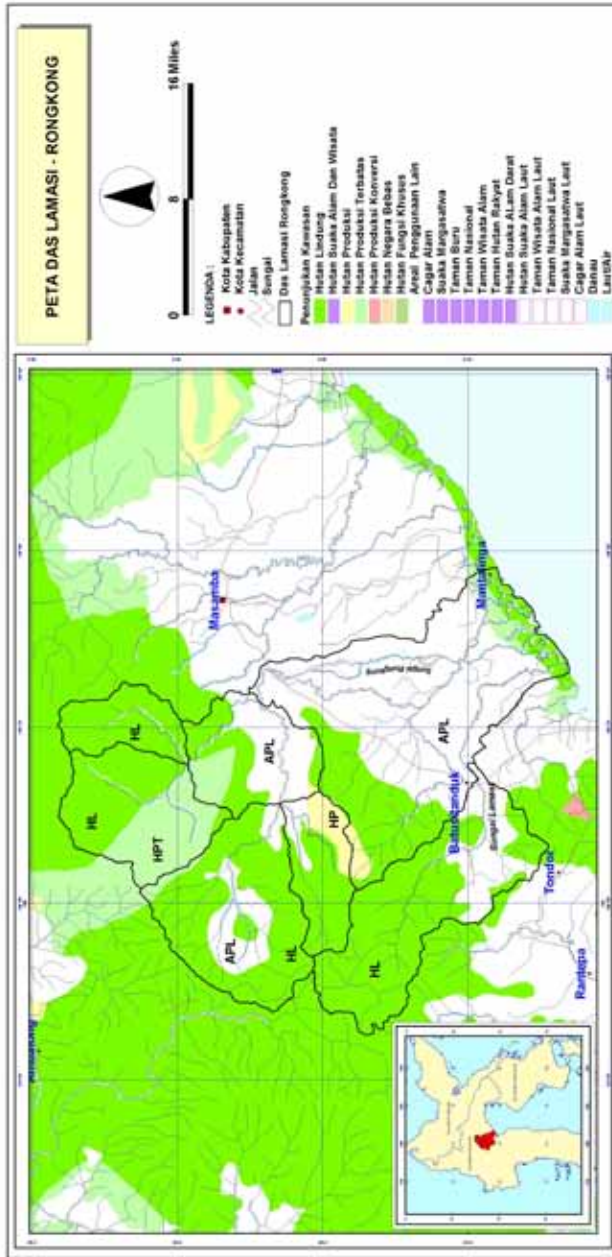
- Gol, 2006.** Government Regulation No. 20 of 2006 about Irrigation. Government of the Republic of Indonesia.
- Gol, 2004.** Act No.7 of 2004 about Water Resource. Government of the Republic of Indonesia.
- Kabupaten Luwu, 2010.** Surat Keputusan Bupati Nomor 27/1/2010 tentang Pembentukan Tim Integrasi untuk Pengontrolan Tambang Ilegal di Kabupaten Luwu. Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. Luwu.
- Kabupaten Luwu, 2006.** Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamasi. Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. Luwu.
- Kabupaten Luwu Utara, 2004.** Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko. Kabupaten Luwu Utara.
- Kahman H., R. Mustikasari., 2011.** Field Report on Testing the Livelihood and Activity Analyses in the Lamasi River Basin. Telapak. Bogor.
- Mustikasari R., 2011.** Getting a Water User's Perspectives, A Guide for Analyzing Livelihoods and Economic Activities in the Context of a Negotiated Approach to Integrated Water Resources Management. Telapak. Bogor.
- Provinsi Sulawesi Selatan, 2008.** Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pola Kerja Kantor Pemerintahan Sulawesi Selatan.
- YBS, 2007.** Proposal to IUCN Not Published. Negotiated Approach to River Basin Management: "Promoting Sustainable Management of Lamasi - Rongkong Basin to Ensure Sustainable Livelihood and Natural Resources".

Lampiran

Lampiran I . Peta DAS Lamasi .



Lampiran 2. Peta DAS Lamasi dan Rongkong.



Lampiran 3. Daftar Desa-Desa di DAS Lamasi

Kecamatan	Desa	Populasi
Kabupaten Toraja Utara		
Nanggala	Lembang Lilikira	NA
Sa'dan	Lembang Sangkaropi	NA
Luwu Utara		
Baebunta	Lawewe	NA
	Bone Subur	NA
Kabupaten Luwu		
Walenrang Barat	Lamasi Hulu	2.043
	Lempe Pasang	814
	Lempe	1.038
	IlanBatuUru	2.827
	IlanBatu	2.429
	Lewandi	979
Walenrang	Walenrang	1.620
	BatuSitanduk	2.117
	Bulo	1.558
	Harapan	2.369
	Saragi	1.052
	Lalong	3.811
Walenrang Timur	SukaDamai	1.956
	Pangalli	1.814
	RanteDamai	2.694
	Kendekan	1.660
	Tabah	2.768
	Tanete	2.205
	Lamasi Pantai	2.180
	Seba-seba	2.506

Kecamatan	Desa	Populasi
Walenrang Utara	Sangtandung	1.375
	bolong	2.895
Lamasi	Wiwitan	3.150
	Padang kalua	1.569
	Lamasi	2.673
	Salujambu	1.507
	Wiwitantimur	1.592
Lamasi Timur	Pelalan	1.607
	Seriti	2.529
	Bulo Londong	1.428
	To' lemo	967
	Salupao	1.387
	Pompengan Tengah	696
	Pompengan	1.675
	Pompengan Utara	1.676
Popengan Pantai	688	
Total Populasi DAS Lamasi:		55.559

Sumber: BPS Luwu, 2009

Catatan: tidak ada cukup data populasi di Toraja Utara dan Luwu Utara



Telapak merupakan asosiasi dari aktivis LSM, praktisi bisnis, akademisi, afiliasi media, dan pemimpin masyarakat adat. Telapak bekerja bersama petani dan nelayan untuk menuju Indonesia yang berdaulat, berkerakyatan, dan lestari. Telapak mampu melakukan berbagai aktivitasnya melalui koperasi, perusahaan berbasis masyarakat dalam percetakan, media massa, pertanian organik, dan pengelolaan sumber daya hutan serta laut secara lestari.

Misi Telapak adalah untuk mempengaruhi kebijakan yang berhubungan dengan konservasi, untuk membangun dan mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat lokal, dan menghentikan kerusakan ekosistem yang merugikan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah dengan sumber daya alam yang kaya.

Alamat:

Jl. Pajajaran No. 54 Bogor 16143

Jawa Barat, Indonesia

Phone : +62 251 8393 245

Fax : +62 251 8393 246

Email: info@telapak.org

Website: www.telapak.org

www.air.telapak.org

Authors:

Hisma Kahman

Perkumpulan Bumi Sawerigading, Palopo, South Sulawesi
Pengacara hukum, Pendamping Masyarakat Lokal
(hisma_cute@yahoo.co.id)



Pandangan terhadap Telapak CDP IWRM NA: kegiatan training ini telah berkontribusi besar terhadap peningkatan kemampuan diri dan juga organisasi PBS. Serial dokumentasi yang dipublikasikan akan membawa keuntungan untuk masyarakat di DAS Lamasi dan khususnya jajaran pemerintahan Kabupaten Luwu. PBS telah bekerja di DAS Lamasi sejak tahun 1999 tetapi hasil pengamatan kami hanya bisa diceritakan tidak dituliskan. Kami selalu kesulitan merespon pertanyaan ketika mereka meminta dokumentasi tertulis tentang kegiatan kami. Proyek CDP ini memprioritaskan pencatatan dan publikasi hasil-hasil kerja PBS. Oleh karenanya kami sangat berterimakasih. Hal menarik lainnya dari proyek ini, pengambilan keputusan atas sebuah perdebatan, kami lakukan melalui proses diskusi dan demokrasi kesepakatan bersama. Mimpi saya tentang air: *Now and forever*, air tetap menjadi anugerah untuk kehidupan, bukan

sebuah mala petaka yang justru menghancurkan kehidupan masyarakat. 5 - 10 tahun kedepan tidak ada lagi masalah yang muncul karena persoalan manajemen air yang kurang baik.

Rita Mustikasari

Coordinator Water Program (2010-2012),
Telapak Bogor, Indonesia
ritamustikasari@gmail.com



Gelar Master dari Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2005 dan sarjana dari Fakultas Kehutanan IPB tahun 1994. Menjadi peneliti muda dalam bidang Hasil Hutan Bukan Kayu di CIFOR (Center for International Forestry Research Organisation) 1995-2002. Menghabiskan waktu satu tahun magang sebagai Indonesian Liaison Officer di World Forest Institute di Portland, Oregon, Amerika Serikat tahun 1994-1995. Baru-baru ini menerima penghargaan sebagai fellow Joke Waller Hunter Initiative (<http://www.bothends.info/JWH/EngJokeWallerHunter.html>) untuk program 'Leadership Development of Environmental Leaders from the South' sejak Juli 2010. Aktif dalam kegiatan Komunitas Peduli Tjiliwoeng (KPC) (<http://www.tjiliwoeng.co.cc/>) Bogor untuk mewujudkan mimpi indah Sungai Ciliwung melalui gerakan sukarela ala komunitas.

Contributor:

Rob Koudstaal

wilrob2@gmail.com



Rob Koudstaal memiliki latar belakang teknik sipil. Beliau pensiun dari pengalaman panjangnya sebagai seorang konsultan perencanaan pengelolaan air terpadu dan pengelolaan kawasan pantai di banyak tempat di dunia. Sejak 2005 terlibat dalam proyek internasional untuk mengembangkan pendekatan aplikatif untuk konsep Pendekatan Negosiasi (NA) menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM). Termasuk di dalamnya pengembangan kapasitas beberapa LSM di Indonesia dan beberapa negara di Latin Amerika yang mengembangkan konsep NA, dalam usahanya melibatkan kelompok pengguna air lokal dan komunitas masyarakat sipil lainnya dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan air di wilayahnya.

Denny Boy Mochran



Denny Boy Mochran telah bekerja sejak 1990 sebagai seorang profesional fasilitator untuk peningkatan pendidikan lingkungan untuk kaum muda, kemudian dia mengembangkan keahlian fasilitatornya ke arah pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas diri manusia dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan pendidikan orang dewasa. Dengan pengalaman dalam memfasilitasi dan melaksanakan training untuk pengembangan sumber daya manusia, Boy menjadi konsultan termasuk *Cornerstone Leadership Training, Building Community Leadership to Take Civic Action, Leadership, Problem Mapping, Participatory Monitoring & Evaluation, Mind Mapping, Strategic Planning, and Integrated Coastal Zone Management for Small Island Management.*

Latar belakang pendidikan Teknik Industri, spesialisasi dalam hal Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Industri dari Universitas Pasudan-Bandung. Boy mengembangkan keahlian dalam memfasilitasi perencanaan partisipatif bersama masyarakat, sistem informasi berbasis masyarakat, dan perencanaan strategis yang dilaksanakan Yayasan Puter, Bogor, *Institute for Public Private Partnership* di Washington DC Amerika, dan *The World Fish Center* di Filipina. Dan memfasilitasi kepemimpinan masyarakat melalui *Leadership Plenty Workshop Indonesian Version* sebagai bagian dari keterlibatannya dalam Program *Cornerstone* dari *Kenan Institute of Private Enterprise* yang berbasis di Washington DC Amerika.

Oka Andriansyah

Executive Director, Yayasan Ulayat Bengkulu, 2008 – current



Lulus sarjana dari Jurusan Manajemen Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Bandar Lampung tahun 2004. Menjadi Anggota Telapak, Koordinator Teritori Indonesia Bagian Barat untuk bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga dalam isu IWRM (mulai Oktober 2009-sampai sekarang). Aktif di Pengembangan WIN, Yayasan Wahana Indonesia Membangun (www.win-development.org).

Tertarik dalam memimpin dan mengembangkan kepercayaan diri di dalam pembangunan multi-sektor komunitas utamanya untuk isu air dan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pendidikan, usaha kecil, dan sektor lain terkait pengembangan potensial dan kapasitas manajemen masyarakat lokal.

Beberapa proyek yang sudah dilaksanakan termasuk Good Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (GGWRM-PMU Lampung) tahun 2005; Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Pengguna Air di Kawasan Daerah Aliran Sungai oleh LP3ES, Both ENDS dan Telapak (didanai WASAP-Bank Dunia) tahun 2008-2009; WIN Development di bawah sub-kontrak CWSP NAD-NIAS tahun 2009.